

BAB II
HASIL LOKAKARYA
DAN REKOMENDASI

A. Hasil Lokakarya

1. Hasil lokakarya kurikulum ini sesuai dengan maksud dan tujuan lokakarya kurikulum MKPK PP & PKN itu sendiri yaitu sebagai upaya menyatukan Visi, Misi, Isi, Metode dan Evaluasi Pengajaran/Pendidikan MKPK PP dan PKN dalam satu wadah Kurikulum Baru yang sesuai dengan Kurnas dan SK Dirjen Dikti No. 265/Dikti / Kep/2000 dan No. 267/Dikti/Kep/2000 , yang mana ketentuan itu mulai berlaku sejak tanggal 10 Agustus 2000 yang lalu. Di samping itu juga untuk menyambut Rencana Kebijakan Universitas untuk menerapkan aturan baru dengan penyajian 2 SKS/IJS untuk Pendidikan Pancasila dan 2 SKS/I JS untuk Pendidikan Kewarganegaraan, yang disajikan dalam semester yang bersamaan. (dasar hukum :SE. PR I No. 11.6.f/084/BAA-UMM/II/2001 tentang Lokakarya Kurikulum diktum ke 4 butir b.).
2. Sebagai ajang sosialisasi dan wadah tukar pikiran (*sharing*) antara pembuat kebijaksanaan dan aparat pelaksana kebijaksanaan (dosen pembina) di lapangan, maka dengan lokakarya kurikulum ini dicapai beberapa titik temu dalam pemikiran dan konsep tentang pengajaran MKPK Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang di masa depan (Tahun Ajaran 2001/2002).
3. Pada waktu diskusi / session perumusan hasil, peserta lokakarya dibagi menjadi dua kelompok yang membahas Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan yang menghasilkan beberapa kesimpulan dan rekomendasi (butir B) seperti berikut ini.

a) Hasil Kelompok I (Tim Pendidikan Pancasila):

Ketua Sidang: Ir. Indah Prihartini, MP

Anggota: 1. Drs. H. Madari

2. Drs. Suyitno

3. Drs. Humaidi Tatapangarsa

4. Drs. Agus Tinus
5. Drs. Rohmad Widodo, M.Si.
6. Dra. Nurul Zuriah, M.Si.
7. Dra. Trisakti Handayani, MM.
8. Mohammad Najih, SH, MH.
9. Drs. Joko Asihono
10. Drs. H. Nurhadi, M.Ap.

HASIL :

Setelah melalui diskusi dan argumentasi dari masing-masing peserta lokakarya yang cukup alot maka diperoleh beberapa kesimpulan dan kesepakatan dari pihak-pihak yang terlibat dalam kelompok I yang isinya antara lain:

- 1) Kelompok ini menyepakati pemberian/pengajaran matakuliah MKPK Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan dilakukan secara terpisah tidak digabungkan. Dengan SKS/ JS Ideal sesuai dengan Kurnas 2 SKS / 2 JS untuk Pendidikan Pancasila dan 2 SKS / 2 JS untuk Pendidikan Kewarganegaraan. Adapun alasan/ Rasionalitas yang dikemukakan antara lain:
 - a. Sasaran belajar mengajar akan tercapai;
 - b. Target tercapai (Kurnas dan Akreditasi Nasional);
 - c. Minimisasi kemungkinan tidak tepat waktu pada awal kuliah (tradisi mahasiswa UMM yang suka molor pada awal perkuliahan)
 - d. Urgensi matakuliah ini masih cukup relevan dan penting untuk kehidupan bangsa dan sesuai visi dan misi universitas (Wacana Keilmuan dan Keislaman).
 - e. Kemungkinan protes dan gejolak serta konflik antara dosen dengan mahasiswa, dosen dengan pimpinan dan pembuat kebijaksanaan tidak akan terjadi (karena sesuai dengan aturan main / *rule of law* yang ada).

2) Apabila matakuliah ini digabung dan diberlakukan 2 SKS / 1 JS maka, kemungkinan atau alternatif yang ditawarkan adalah:

a) Matakuliah ini harus tetap dipisah dan diberikan selama 1 semester (16 kali pertemuan) dengan jam penyajian 1 jam (50 menit) untuk MKPK Pendidikan Pancasila dan 1 jam (50 menit) untuk MKPK Pendidikan Kewarganegaraan dan kekurangan 1 jam penyajian dilakukan dengan memberikan tugas di luar jam tatap muka. Kebijakan ini mungkin bisa diambil dengan beberapa resiko yang mungkin muncul antara lain:

- (1) protes dari mahasiswa dan dosen yang menanyakan maksud, urgensi dan dampak dari kebijakan tersebut.
- (2) Mungkin semangat belajar dan mengajar mahasiswa dan dosen akan menurun tajam dan menimbulkan image yang kurang baik terhadap dosen dan matakuliah ini.
- (3) Sasaran / target belajar mengajar kurang dapat dicapai secara optimal.
- (4) Tidak sesuai dengan kurnas dan perlu diperhitungkan dengan resiko yang mungkin akan diambil berkaitan dengan hasil dan tim akreditasi dan visitasi (BAN) perguruan tinggi.
- (5) Dosen pembina kemungkinan masih bisa dilakukan oleh dua orang pembina MK, tanpa beban belajar –mengajar yang sangat banyak.

b) Mata kuliah ini digabung dalam artian dimampatkan materi dan waktu penyajiannya (7 kali pertemuan untuk MKPK Pendidikan Pancasila + 1 kali midle test dan 6 kali pertemuan untuk MKPK Pendidikan Kewarganegaraan + 1 kali midle test + 1 kali final test untuk MKPK Pendidikan Pancasila dan

diambil dengan beberapa kelemahan dan resiko yang akan muncul dalam pelaksanaannya nanti antara lain:

- (1) Sasaran dan target belajar – mengajar tidak tercapai .
- (2) Tidak sesuai dengan Kurikulum Nasional baik materi, metode maupun JS-nya dan kemungkinan dampak/resiko yang harus ditanggung (dicabut akreditasinya) oleh BAN PT.
- (3) Dosen menjadi kurang bergairah dan merasa berdosa karena mengkhianati aturan atau kebijaksanaan (Kurnas) yang ada.
- (4) Image yang kurang baik di mata mahasiswa terhadap matakuliah dan dosen karena dianggap tidak penting dan tidak berguna bagi mereka, seakan-akan hanya pelengkap kurikulum saja.
- (5) Tradisi molor dan tidak tepat waktu pada mahasiswa sehingga berdampak pada pengacauan *Time Scedule /* Jadwal Acara perkuliahan yang telah disusun sehingga dalam pelaksanaan akan terjadi kekacauan dan ambiguitas.
- (6) Kemungkinan hari libur Nasional (tanggal merah) ataupun acara dosen pengajar yang mendadak dan tidak dapat ditinggalkan akan mengacaukan pelaksanaan KBM kedua matakuliah ini nanti.
- (7) Dari pengelola administrasi (Kajur dan PD I) di tingkat fakultas dikeluhkan kemungkinan adanya keruwetan administrasi dalam hal penilaian kedua matakuliah ini. Bagaimana kalau salah satu diantara keduanya tidak lulus.? Apakah mahasiswa yang menempuh matakuliah ini harus diluluskan tanpa kriteria Evaluasi yang telah ada dalam buku pedoman akademik?.
- (8) Kemungkinan besar terjadi protes dari mahasiswa dan dosen yang mempermasalahkan dan menanyakan maksud,

- 3) Dua matakuliah ini dilebur menjadi matakuliah baru dengan nama baru yang sesuai dengan visi dan misi universitas tapi juga mengadopsi ketentuan kurnas dan dimungkinkan konversi nilai untuk 2 matakuliah tersebut. Tentunya harus diperhatikan kelebihan, keunggulan dan dampak serta kemungkinan dari kebijakan ini.

b) Hasil Kelompok II (Tim Pendidikan Kewarganegaraan)

Ketua Sidang: Drs. Budiono

- Anggota:
1. Drs. Ahsanul In'am, MM.
 2. Dra. Vina Salviana DS, M.Si.
 3. Drs. H. M. Mansyur, MM.
 4. Drs. Jarot Sugiono, M.Si.
 5. Drs. Sudjalil, M.Si.
 6. Ir. Mohammad Chanan, M.Hut.
 7. Ir. Ermanu Azizul Hakim, MT.
 8. Drs. Syamsul Rizal Yazid, MA.
 9. DR. Saadun Akbar
 10. DR. Agus Kresno Budianto, M.Kes.

HASIL :

Setelah melalui diskusi dan argumentasi dari masing-masing peserta lokakarya yang cukup alot maka diperoleh beberapa kesimpulan dan kesepakatan dari pihak-pihak yang terlibat dalam kelompok II yang isinya antara lain:

- 1) Urgensi matakuliah PKN untuk saat ini masih sangat relevan dan diperlukan karena berlaku kata pepatah : dimana ada negara , disitu pula PKN diperlukan;
- 2) PKN atau Civic bukan hanya milik dan berlaku di Indonesia saja, melainkan sudah menjadi milik seluruh bangsa/ negara di dunia

- 3) PKN meskipun telah menjadi world community, PKN harus tetap punya landasan pijak, yaitu sebagai landasan berdirinya negara yaitu Pembukaan UUD 1945 sebagai warisan para the founding fathers dan fondamen berdirinya NKRI.
- 4) PKN mempunyai tujuan dan sasaran akhir mewujudkan Good Citizen (warganegara yang baik).
- 5) Kemungkinan digabungnya MKPK Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan mungkin dapat dilakukan dengan catatan pembinanya satu orang dosen dan alokasi penyajiannya pertemuan 1- 8 untuk MKPK Pendidikan Pancasila dan 9-16 untuk MKPK Pendidikan Kewarganegaraan. Hal yang perlu diperhatikan adalah beban mengajar dan belajar dosen yang sangat padat dan sangat banyak mungkin akan *overload* dan kemungkinan terjadi penumpukan pada satu semester dan semester lainnya terjadi kevakuman.
- 6) Matakuliah MKPK Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan kemungkinan dilakukan pada semester 3 dan 4. Kalau semester satu target dan sasaran belajar (mahasiswa) belum dapat diajak diskusi dan tugas lain sehingga prinsip efisiensi, efektifitas dan kualitas tidak dapat dijalankan.
- 7) Kalau matakuliah ini digabungkan maka kelemahan yang mungkin muncul adalah dilaksanakan 2 kali UTS dalam 1 semester dan ada kebekuan menunggu materi berikutnya dari jadwal yang mungkin molor.
- 8) Kemungkinan menyusun tim dan delegasi untuk menyampaikan beberapa keberatan/kelemahan akibat dari dampak kebijakan yang akan dijalankan kepada Pembuat Kebijakan (decision maker) C.q Rektor, PR I dan Kabiro AA, serta Kabag AIK dan MKU untuk

B. Rekomendasi

Adapun rekomendasi hasil lokakarya yang dapat diajukan ke Universitas dalam hal ini: Bapak Rektor dan Pembantu Rektor I sebagai bahan pertimbangan / masukan untuk membuat kebijakan lebih lanjut terhadap Matakuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai berikut.

1. ***Kembali ke Kurnas dalam hal ini: SK Dirjen Dikti No. 265/Dikti / Kep/2000 dan No. 267/ Dikti/Kep/2000***, yang mana ketentuan itu mulai berlaku sejak tanggal 10 Agustus 2000, yang mensuratkan dan mensiratkan sarat minimum pemberian matakuliah ini 2 SKS / 2 JS untuk MKPK Pendidikan Pancasila dan 2 SKS/ 2 JS untuk MKPK Pendidikan Kewarganegaraan. Dengan Resiko dan kemungkinan gejolak yang relatif kecil di lapangan.

Adapun alasan/ Rasionalitas yang dikemukakan antara lain:

- a. Sasaran belajar mengajar akan tercapai;
- b. Target tercapai (Kurnas dan Akreditasi Nasional);
- c. Minimisasi kemungkinan tidak tepat waktu pada awal kuliah (tradisi mahasiswa UMM yang suka molor pada awal perkuliahan)
- d. Urgensi matakuliah ini masih cukup relevan dan penting untuk kehidupan bangsa dan sesuai visi dan misi universitas (Wacana Keilmuan dan Keislaman).
- e. Kemungkinan protes dan gejolak serta konflik antara dosen dengan mahasiswa, dosen dengan pimpinan dan pembuat kebijaksanaan tidak akan terjadi (karena sesuai dengan aturan main / *rule of law* yang ada).

2. ***Matakuliah ini "digabung" dan diberlakukan 2 SKS / 1 JS maka, kemungkinan atau alternatif yang ditawarkan adalah:***

- a) Matakuliah ini harus tetap dipisah dan diberikan selama 1 semester (16 kali pertemuan) dengan jam penyajian 1 jam (50 menit) untuk MKPK Pendidikan Pancasila dan 1 jam (50 menit) untuk MKPK Pendidikan

memberikan tugas di luar jam tatap muka. Kebijakan ini mungkin bisa diambil dengan beberapa resiko yang mungkin muncul antara lain:

- (1) protes dari mahasiswa dan dosen yang menanyakan maksud, urgensi dan dampak dari kebijakan tersebut.
- (2) Mungkin semangat belajar dan mengajar mahasiswa dan dosen akan menurun tajam dan menimbulkan image yang kurang baik terhadap dosen dan matakuliah ini.
- (3) Sasaran / target belajar mengajar kurang dapat dicapai secara optimal.
- (4) Tidak sesuai dengan kurnas dan perlu diperhitungkan dengan resiko yang mungkin akan diambil berkaitan dengan hasil dan tim akreditasi dan visitasi (BAN) perguruan tinggi.
- (5) Dosen pembina kemungkinan masih bisa dilakukan oleh dua orang pembina MK, tanpa beban belajar –mengajar yang sangat banyak.

b) Mata kuliah ini digabung dalam arian dimampatkan materi dan waktu penyajiannya (7 kali pertemuan untuk MKPK Pendidikan Pancasila + 1 kali midle test dan 6 kali pertemuan untuk MKPK Pendidikan Kewarganegaraan + 1 kali midle test + 1 kali final test untuk MKPK Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan). Kebijakan ini juga mungkin diambil dengan beberapa kelemahan dan resiko yang akan muncul dalam pelaksanaannya nanti antara lain:

- (1) Sasaran dan target belajar – mengajar tidak tercapai .
- (2) Tidak sesuai dengan Kurikulum Nasional baik materi, metode maupun JS-nya dan kemungkinan dampak/resiko yang harus ditanggung (dicabut akreditasinya) oleh BAN PT.
- (3) Dosen menjadi kurang bergairah dan merasa berdosa karena mengkhianati aturan atau kebijaksanaan (Kurnas) yang ada.
- (4) Image yang kurang baik di mata mahasiswa terhadap matakuliah dan dosen karena dianggap tidak penting dan tidak berguna bagi mereka,

- (5) Tradisi molor dan tidak tepat waktu pada mahasiswa sehingga berdampak pada pengacauan *Time Schedule* / Jadwal Acara perkuliahan yang telah disusun sehingga dalam pelaksanaan akan terjadi kekacauan dan ambiguitas.
- (6) Kemungkinan hari libur Nasional (tanggal merah) ataupun acara dosen pengajar yang mendadak dan tidak dapat ditinggalkan akan mengacaukan pelaksanaan KBM kedua matakuliah ini nanti.
- (7) Dari pengelola administrasi (Kajur dan PD I) di tingkat fakultas dikeluhkan kemungkinan adanya keruwetan administrasi dalam hal penilaian kedua matakuliah ini. Bagaimana kalau salah satu diantara keduanya tidak lulus? Apakah mahasiswa yang menempuh matakuliah ini harus diluluskan tanpa mempertimbangkan kriteria Evaluasi yang telah ada dalam buku pedoman akademik?.
- (8) Kemungkinan besar terjadi protes dari mahasiswa dan dosen yang mempermasalahkan dan menanyakan maksud, urgensi dan dampak dari kebijaksanaan tersebut.

3) *Dilebur dan dijadikan Matakuliah Baru.*

Dua matakuliah ini dilebur menjadi matakuliah baru dengan nama baru yang sesuai dengan visi dan misi universitas tapi juga mengadopsi ketentuan kurnas dan dimungkinkan konversi nilai untuk 2 matakuliah tersebut. Tentunya harus diperhatikan kelebihan, keunggulan dan dampak serta kemungkinan dari kebijakan ini.

Demikian rekomendasi yang dapat kami (Tim Perancang dan Pengembang MKPK PPKN) ajukan berdasarkan hasil lokakarya dan penggodokan tim perumus hasil yang telah bersidang beberapa kali dalam rangka mencari solusi yang tepat untuk memformat penyajian Matakuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan sesuai dengan Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Malang dengan memperhatikan suara dan aspirasi dari bawah..

C. SATUAN ACARA PERKULIAHAN MKPK PENDIDIKAN PANCA-SILA DAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

C. 1 SAP / SILABUS MKPK Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewar-ganegaraan Sesuai Kurnas

SAP / SILABUS MATA KULIAH

Matakuliah	: <i>1. Pendidikan Pancasila dan 2. Pendidikan Kewarganegaraan</i>
Pembina	: Tim Dosen PPKn
Jurusan	: Semua Jurusan
Semester	: I atau II atau III
Jumlah SKS/JS	: 2+2 (4) SKS/ 2 + 2 (4) JS

1. Tujuan Perkuliahan

Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa mempunyai seperangkat pengetahuan dan pemahaman tentang :

- 1) Pancasila sebagai Nilai Dasar dan Dasar Negara, Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dengan Kajian Historis, Yuridis dan Filosofis serta memahmi Pancasila sebagai Paradigma dan aktualisasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 2) Hubungan antara warganegara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warganegara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

2. Deskripsi Singkat Matakuliah

- (1) Matakuliah ini diberikan kepada mahasiswa semua program studi dengan SKS minimal 2 SKS (Pend. Pancasila) dan 2 SKS (Pend. Kewar-ganegaraan) dan 2 JS untuk Pend. Pancasila dan 2 JS untuk Pend. Kewarganegaraan.
- (2) Matakuliah Pendidikan Pancasila menjelaskan tentang landasan dan tujuan Pendidikan Pancasila, pertumbuhan faham kebangsaan Indonesia, Sistem Ketatanegaraan RI, dinamika pelaksanaan UUD 1945, Pancasila sebagai sistem Filsafat, Pancasila sebagai sistem etika, Pancasila sebagai ideologi serta Pancasila sebagai Paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (3) Matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan meliputi pokok-pokok bahasan tentang: (a) Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan yang mencakup: hak dan kewajiban warga negara, pendidikan pendahuluan belanegara; demokrasi Indonesia, dan hak azasi manusia. (b) Wawasan Nusantara, (c) Ketahanan Nasional dan (d) Politik dan Strategi Nasional

3. Ruang Lingkup Materi dan Penyajiannya

3.1 Matakuliah Pendidikan Pancasila

No	Pokok Bahasan	Buku Sumber	Metode	Pertemuan
*	Perkenalan & Deskripsi MK/ Silabus MK	-	Ceramah Interview	Minggu I
1.	Landasan dan tujuan Pendidikan Pancasila a. Landasan Pendidikan Pancasila b. Tujuan Pendidikan Pancasila	Kode Buku : a)* h)* o)*	Ceramah Tanya Jawab Diskusi	Minggu II
2.	Pertumbuhan Faham Kebangsaan Indonesia a. Masa Kejayaan Nasional; b. Perjuangan BI melawan Penjajahan; c. Proklamasi 17 - 8 - 1945 d. Perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan.	Kode Buku: a)* k)* o)* p)*	Ceramah Tanya Jawab Diskusi	Minggu III Dan Minggu IV
3.	Pengertian, Kedudukan, sifat dan fungsi UUD 1945 dan Pembukaan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental a. Pengertian, kedudukan, sifat dan fungsi UUD 1945 b. Pembukaan UUD 45 dan pokok pikiran yang terkandung di dalamnya c. Sistem pemerintahan negara RI berdasar UUD 1945. d. Dinamika pelaksanaan UUD 1945	Kode Buku: a)* b)* e)* h)* i)* q)*	Ceramah Tanya Jawab Resitasi	Minggu V Minggu VI Dan Minggu VII
4.	<i>F. Midle Test</i>	<i>G. Materl 1-3</i>	Taxe Home /analisa Kasus dan pemecahannya	Minggu VIII
5.	Pancasila Sebagai Sistem Filsafat a. Cara dan Ciri berfikir filsafati; b. Pengertian Pancasila secara filsafati; c. Nilai-Nilai Pancasila sebagai dasar keseimbangan hak dan kewajiban warga negara.	Kode Buku: a)* b)* c)* d)* f)* h)* l)*	Ceramah Tanya jawab Resitasi	Minggu IX Dan Minggu X
6.	Pancasila Sebagai Ideologi a. Pengertian Ideologi	Kode Buku: a)*	Diskusi Resitasi	Minggu XI Dan

	c. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain; d. Pancasila sebagai ideologi terbuka.	g)* h)* i)* n)* j.	Portofolio Analisa Kasus	Minggu XII
7.	Pancasila sebagai Paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (paradigma pembangunan nasional); a. Pengertian paradigma; b. Pancasila sebagai paradigma pengembangan IPTEK	Kode Buku: a)* e)* h)* i)* j)* n)* j.	Diskusi Resitasi Portofolio Role Playing	Minggu XIII Dan Minggu XIV
8.	Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan Kampus; a. Tridharma Perguruan Tinggi; b. Budaya Akademik; c. Kampus sebagai Morai Force pengembangan hukum dan HAM	Kode Buku: a)* g)* j)* k)* p)* q)* b. i. j.	Diskusi Analisa Kasus Portofolio VCT	Minggu XV
9.	Final Test	Materi 1-8	Ujian Lisan Ujian Ke-lompok Ujian Tulis	Minggu XVI

3.2 Matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan

No	Pokok Bahasan	Buku Sumber	Metode	Pertemuan
*	Perkenalan & Deskripsi MK/ Silabus MK	-	3. Ceramah 4. Interview	Minggu I
1.	Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan: a. Latarbelakang dan sejarah serta kompetensi yang diharapkan; b. Pemahaman tentang bangsa, negara dan hak kewajiban serta HAM dan bela negara; c. Keterkaitan Pancasila, UUD 1945, Wasantara dan Tannas; d. Perkembangan PKN;	Kode Buku: 1)# 2)# 3)# 4)# 6)# 16)# a. c. e. h.	Ceramah Diskusi Role Playing	Minggu II Minggu III Dan Minggu IV
2.	Konsepsi Wasantara; a. Latarbelakang filosofis Wasantara; b. Wasantara sebagai wawasan pembangunan na-	Kode Buku: 1)# 4)# 8)# 9)#	Diskusi Ceramah Analisa Kasus	Minggu V Dan Minggu VI

	sional; c. Implementasi wasantara;	12)# 13)# 14)# j.		
3.	H. Middle Test		Taxe Home exam / Tulis	Minggu VII
4.	Konsepsi dan Peran Tannas di Indonesia: a. Latar belakang dan konsepsi serta kondisi tannas di Indonesia; b. Pokok-pokok pikiran tentang tannas; c. Pengaruh HAM, Demo-kraasi dan lingkungan hidup dalam Tannas (IPOLEKSOSBUDHANKA M):	Kode Buku: 1)# 3)# 4)# 16)# b. c. i. j.	Analisa Kasus Diskusi Resitasi	Minggu VIII Minggu IX Minggu X Dan Minggu XI
5.	Politik dan Strategi Nasional a. Perkembangan pengertian politik dan demokrasi dalam kehidupan ber-bangsa dan bernegara. b. Perkembangan pemikiran strategis dalam pelaksa-naan pembangunan berke-lanjutan c. Politik Pembangunan Nasional, manajemen nasi-onal dan otonomi daerah; d. Implementasi politik dan strategi nasional dalam bidang-bidang pemba-ngunan nasional.	Kode Buku: 1)# 3)# 4)# 12)# 14)# 15)# 16)# d. i. f.	Ceramah Diskusi Resitasi	Minggu XII Minggu XIII Minggu XIV Dan Minggu XV
6.	Final Test		Ujian Tulis/ Lisan dan Portofolio	Minggu XVI

4. Evaluasi

5. BUKU LITERATUR WAJIB

5.1 PENDIDIKAN PANCASILA

- a)* SK Dirjen Dikti No.265/Dikti/Kep/2000 tentang *Penyempurnaan Kurikulum Inti Matakuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Pancasila Pada Perguruan Tinggi Di Indonesia*.
- b)* A Malik Fadjar, dkk. *Pancasila Dasar Filsafat Negara*, UMM-Press: Malang.
- c)* Dardji Darmodiharjo, *Pancasila Suatu Orientasi Singkat*, PN Balai Pustaka: Jakarta.
- d)* Louis O. Kattsoff, *Pengantar Filsafat*, alih bahasa Soejono Soemargono: Pembangunan-an: Jakarta..
- e)* Notonagoro, *Pembukaan UUD 1945 (pokok Kaidah Fundamental Negara Indonesia)*, UGM, Yogyakarta.
- f)* -----, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Pancuran Tujuh: Jakarta.
- g)* -----, *Beberapa Hal mengenai Falsafah Pancasila*, Pancuran Tujuh: Jakarta.
- h)* Nurul Zuriah, *Langkah Awal Memahami Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*, UMM-Press: Malang .
- i)* Oetoyo Oesman, Alfian, dkk. *Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, BP-7 : Jakarta.
- j)* Pusat Studi Pancasila UGM, *Reformasi dalam Perspektif Filsafat Hukum, Politik, Keamanan, Globallsasi dan Pembangunan Ekonomi*, Jurnalistik Filsafat Pancasila No. 3: Yogyakarta.
- k)* Sartono Kartodirdjo, *Kebudayaan Pembangunan dalam Perspektif Sejarah*, Gajah Mada University Press: Yogyakarta.
- l)* Sunoto, *Mengenal Filsafat Pancasila I, II, III dan IV*, Hanindita: Yogyakarta.
- m)* Soediman Kartohadiprodjo, *Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila*, Alumni: Bandung.
- n)* Soeroso Prawirohardjo, dkk, *Pancasila Sebagai Orientasi Ilmu*, PT. BP Kedaulatan Rakyat: Yogyakarta.
- o)* Sri Soeprapto, *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*, LP3UGM: Yogyakarta.
- p)* Suwarno, PJ. *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*, Kanisius: Yogyakarta.
- q)* *UUD 1945 dengan Amandemen*;

2. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

- 1)# SK Dirjen Dikti No. 267/DIKTI/KEP/2000 tentang *Penyempurnaan Kurikulum Inti Matakuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan Pada Perguruan Tinggi Di Indonesia*.
- 2)# *UUD 1945 dengan Amandemen*;
- 3)# *GBHN/ Propenas* yang sedang berjalan;
- 4)# Lemhanas, *Buku Pendidikan Kewarganegaraan*;
- 5)# *Buku Sejarah Perjuangan Bangsa*;
- 6)# *UU No. 62/1958 tentang Kewarganegaraan*;

- 7)# UU No. 4/1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 8)# UU No. 20/1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Hankamneg RI;
- 9)# UU No. 1/1988 tentang Perubahan UU No. 20/1982;
- 10)# UU No. 2/1988 tentang Prajurit ABRI;
- 11)# UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 12)# UU No. 5/1996 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 13)# UU No. 5/1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia;
- 14)# UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- 15)# UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 16)# UU No. 39/1999 tentang Hak Azasi Manusia.

6. LITERATUR TAMBAHAN

- a. A.S. Hikam, Muhammad, 1999. *Politik Kewarganegaraan Landasan Redemokratisasi di Indonesia*, PT. Gelora Aksara Pratama: Jakarta.
- b. A.S. Hikam, Muhammad, 1996. *Demokrasi dan Civil Society*, Pustaka LP3ES: Jakarta.
- c. Daryono, M. 1998. *Pengantar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Rineka Cipta : Jakarta.
- d. Isjwara, F. 1982. *Pengantar Ilmu Politik*, Angkasa-Ofset : Bandung.
- e. Kansil, C.S.T. 1992. *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta.
- f. Kusnardi, Moh. 1988. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, FH- UI dan CV. Sinar Bakti: Jakarta.
- g. Mangunwijaya, Y.B. 1999. *Merintis RI yang Manusiawi Republik Yang Adil dan Beradab*, Erlangga: Jakarta.
- h. Paulus, B.P. 1983. *Kewarganegaraan RI ditinjau dari UUD 1945*, Pradnya Paramita: Jakarta.
- i. S. Branson, Margaret. 1999. *Belajar Civic Education dari Amerika*, LkiS dan The Asia Foundation: Yogyakarta.
- j. Kliping Koran dan Jurnal yang relevan dll.

C. 2 SAP / SILABUS MKPK Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan Apabila Digabung

SAP/ SILABUS MATA KULIAH

Matakuliah	: Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan
Pembina	: Tim Dosen PPKn
Jurusan	: Semua Jurusan
	: 1

1. Tujuan Perkuliahan

Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa mempunyai seperangkat pengetahuan dan pemahaman tentang :

- (a) Pancasila sebagai Nilai Dasar dan Dasar Negara, Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dengan Kajian Historis, Yuridis dan Filosofis serta memahami Pancasila sebagai Paradigma dan aktualisasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (b) Hubungan antara warganegara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warganegara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

2. Deskripsi Singkat Matakuliah

- (a) Matakuliah ini diberikan kepada mahasiswa semua program studi dengan SKS minimal 2 SKS (Pendid. Pancasila) dan 2 SKS (Pendid. Kewarganegaraan) dan 2 JS untuk Pendid. Pancasila dan 2 JS untuk Pendid. Kewarganegaraan.
- (b) Matakuliah Pendidikan Pancasila menjelaskan tentang landasan dan tujuan Pendidikan Pancasila, pertumbuhan paham kebangsaan Indonesia, Sistem Ketatanegaraan RI, dinamika pelaksanaan UUD 1945, Pancasila sebagai sistem Filsafat, Pancasila sebagai sistem etika, Pancasila sebagai ideologi serta Pancasila sebagai Paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (c) Matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan meliputi pokok-pokok bahasan tentang: (a) Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan yang mencakup: hak dan kewajiban warga negara, pendidikan pendahuluan belanegara; demokrasi Indonesia, dan hak azasi manusia. (b) Wawasan Nusantara, (c) Ketahanan Nasional dan (d) Politik dan Strategi Nasional.

3. Ruang Lingkup Materi dan Penyajiannya

No.	Pokok Bahasan	Buku Sumber	Metode	Pertemuan
*	Perkenalan&RAP/Silabus MK		Ceramah Interview	Minggu I
1.	Landasan dan tujuan Pendidikan Pancasila a. Landasan Pendidikan Pancasila b. Tujuan Pendidikan Pancasila	Kode Buku : a)* h)* o)*	Ceramah Tanya Jawab Diskusi	Minggu II
2.	Pertumbuhan Paham Kebangsaan Indonesia a. Masa Kejayaan Nasional; b. Perjuangan BI melawan Penjajahan; c. Proklamasi 17 - 8 - 1945 d. Perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan.	Kode Buku: a)* k)* o)* p)*	Ceramah Tanya Jawab Diskusi	Minggu III
3	Pengertian Kedudukan sifat	Kode Buku		

	<p>dan fungsi UUD 1945 dan Pembukaan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental:</p> <p>a. Pengertian, kedudukan, sifat dan fungsi UUD 1945 Pembukaan UUD 45 dan pokok pikiran yang terkandung di dalamnya</p> <p>b. Sistem pemerintahan negara RI berdasar UUD 1945.</p> <p>c. Dinamika pelaksanaan UUD 1945</p>	<p>a)* b)* e)* h)* i)* q)*</p>	<p>Ceramah Tanya Jawab Resitasi</p>	<p>Minggu IV</p>
4.	<p>Pancasila Sebagai Sistem Filsafat</p> <p>a. Cara dan Ciri berfikir filsafati;</p> <p>b. Pengertian Pancasila secara filsafati;</p> <p>c. Nilai-Nilai Pancasila sebagai dasar keseimbangan hak dan kewajiban warga negara.</p>	<p>Kode Buku: a)* b)* c)* d)* f)* h)* l)*</p>	<p>Ceramah Tanya jawab Resitasi</p>	<p>Minggu V</p>
5.	<p>Pancasila Sebagai Ideologi</p> <p>a. Pengertian Ideologi</p> <p>b. Makna ideologi bagi negara;</p> <p>c. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain;</p> <p>d. Pancasila sebagai ideologi terbuka.</p>	<p>Kode Buku: a)* c)* g)* h)* i)* n)* j.</p>	<p>Diskusi Resitasi Portofolio Analisa Kasus</p>	<p>Minggu V</p>
6.	<p>Pancasila sebagai Paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (paradigma pembangunan nasional);</p> <p>a. Pengertian paradigma;</p> <p>b. Pancasila sebagai paradigma pengembangan IPTEK</p>	<p>Kode Buku: a)* e)* h)* i)* j)* n)* j.</p>	<p>Diskusi Resitasi Portofolio Role Playing</p>	<p>Minggu VI</p>
7.	<p>Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan Kampus;</p> <p>a. Tridharma Perguruan Tinggi;</p> <p>b. Budaya Akademik;</p> <p>c. Kampus sebagai Moral Force pengembangan hukum dan HAM</p>	<p>Kode Buku: a)* g)* j)* k)* p)* q)* b.</p>	<p>Diskusi Analisa Kasus Portofolio VCT</p>	<p>Minggu VII</p>
	<p>Midle Tes Pendidikan Pancasila</p>	<p>Keseluruhan</p>	<p>Subyektif Test/ Lisan</p>	<p>Minggu VIII</p>
8.	<p>Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan;</p> <p>a. Latarbelakang dan sejarah serta kompetensi yang</p>	<p>Kode Buku: 1)# 2)# 3)#</p>	<p>Ceramah</p>	<p>Minggu IX dan</p>

	<p>diharapkan;</p> <p>b. Pemahaman tentang bangsa, negara dan hak kewajiban serta HAM dan bela negara;</p> <p>c. Keterkaitan Pancasila, UUD 1945, Wasantara dan Tannas;</p> <p>d. Perkembangan PKN;</p>	<p>4)#</p> <p>6)#</p> <p>16)#</p> <p>a.</p> <p>c.</p> <p>e.</p> <p>h.</p>	<p>Role Playing</p>	
9.	<p>Konsepsi Wasantara;</p> <p>a. Latarbelakang filosofis wasantara;</p> <p>b. Wasantara sebagai wawasan pembangunan nasional;</p> <p>c. Implementasi wasantara;</p>	<p>Kode Buku:</p> <p>1)#</p> <p>4)#</p> <p>8)#</p> <p>9)#</p> <p>12)#</p> <p>13)#</p> <p>14)#</p> <p>j.</p>	<p>Diskusi</p> <p>Ceramah</p> <p>Analisa Kasus</p>	<p>Minggu XI</p>
10.	<p>Konsepsi dan Peran Tannas di Indonesia:</p> <p>a. Latar belakang dan konsepsi serta kondisi tannas di Indonesia;</p> <p>b. Pokok-pokok pikiran tentang tannas;</p> <p>c. Pengaruh HAM, Demokrasi dan lingkungan hidup dalam Tannas (IPOLEKSOSBUD-HANKAM):</p>	<p>Kode Buku:</p> <p>1)#</p> <p>3)#</p> <p>4)#</p> <p>16)#</p> <p>b.</p> <p>c.</p> <p>i.</p> <p>j.</p>	<p>Analisa Kasus</p> <p>Diskusi</p> <p>Resitasi</p>	<p>Minggu XII dan Minggu XIII</p>
11.	<p>Politik dan Strategi Nasional</p> <p>a. Perkembangan pengertian politik dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.</p> <p>b. Perkembangan pemikiran strategis dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan</p> <p>c. Politik Pembangunan Nasional, manajemen nasional dan otonomi daerah;</p> <p>d. Implementasi politik dan strategi nasional dalam bidang-bidang pembangunan nasional.</p>	<p>Kode Buku:</p> <p>1)#</p> <p>3)#</p> <p>4)#</p> <p>12)#</p> <p>14)#</p> <p>15)#</p> <p>16)#</p> <p>d.</p> <p>i.</p> <p>f.</p>	<p>Ceramah</p> <p>Diskusi</p> <p>Resitasi</p>	<p>Minggu XIV Dan Minggu XV</p>
	<p>Final Test (MKPK Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan)</p>	<p>Seluruh Referensi</p>	<p>Ujian Tulis dan Portofolio</p>	<p>Minggu XVI</p>

4. Evaluasi

3. Aktivitas dalam kelas	= (bobot: 1)
4. Diskusi	= (bobot: 2)
5. Ujian	= (bobot: 3)
	----- +
Total	= 10 = 100%

5. Buku Literatur

1) PENDIDIKAN PANCASILA

- Notonagoro, Pembukaan UUD 1945 (pokok Kaidah Fundamental Negara Indonesia), UGM, Yogyakarta.
- , Pancasila Dasar Falsafah Negara, Pancuran Tujuh: Jakarta.
- , Beberapa Hal mengenai Falsafah Pancasila, Pancuran Tujuh: Jakarta.
- Dardji Darmodiharjo, Pancasila Suatu Orientasi Singkat, PN Balai Pustaka: Jakarta.
- Pusat Studi Pancasila UGM, Reformasi dalam Perspektif Filsafat Hukum, Politik, Keamanan, Globalisasi dan Pembangunan Ekonomi, Jurnalistik Filsafat Pancasila No. 3: Yogyakarta.
- Sartono Kartodirdjo, Kebudayaan Pembangunan dalam Perspektif Sejarah, Gajah Mada University Press: Yogyakarta.
- Soediman Kartohadiprodjo, Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila, Alumni: Bandung.
- Soeroso Prawirohardjo, dkk, Pancasila Sebagai Orientasi Ilmu, PT. BP Kedaulatan Rakyat: Yogyakarta.
- Sri Soeprpto, Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi, LP3UGM: Yogyakarta.
- Suwarno, PJ. Pancasila Budaya Bangsa Indonesia, Kanisius: Yogyakarta.

2) PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN I

- UUD 1945 dengan Amandemen;
- GBHN/ Propenas yang sedang berjalan;
- Lemhanas, Buku Pendidikan Kewarganegaraan;
- Buku Sejarah Perjuangan Bangsa;
- UU No. 62/1958 tentang Kewarganegaraan;
- UU No. 4/1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- UU No. 20/1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Hankamneg RI;
- UU No. 1/1988 tentang Perubahan UU No. 20/1982;
- UU No. 2/1988 tentang Prajurit ABRI;
- UU No. 2 /1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- UU No. 5/1996 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- UU No. 5/1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia;
- UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah;

6. LITERATUR TAMBAHAN

- a. A.S. Hikam, Muhammad, 1999. *Politik Kewarganegaraan Landasan Redemokratisasi di Indonesia*, PT. Gelora Aksara Pratama: Jakarta.
- b. A.S. Hikam, Muhammad, 1996. *Demokrasi dan Civil Society*, Pustaka LP3ES: Jakarta.
- c. Daryono, M. 1998. *Pengantar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Rineka Cipta : Jakarta.
- d. Isjwara, F. 1982. *Pengantar Ilmu Politik*, Angkasa-Ofset : Bandung.
- e. Kansil, C.S.T. 1992. *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta.
- f. Kusnardi, Moh. 1988. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, FH- UI dan CV. Sinar Bakti: Jakarta.
- g. Mangunwijaya, Y.B. 1999. *Merintis RI yang Manusiawi Republik Yang Adil dan Beradab*, Erlangga: Jakarta.
- h. Paulus, B.P. 1983. *Kewarganegaraan RI ditinjau dari UUD 1945*, Pradnya Paramita: Jakarta.